**PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**

**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Bahriansyah1, Maskan2, Suhardiman3**

1Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,Indonesia

2Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75234,Indonesia

**ABSTRAK**

Bahriansyah. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.

Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah yang memiliki penduduk dengan jumlah dan persebaran yang tinggi, maka pemerintah menggunakan surat pengantar sebagai undangan atau mediator untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Dan diluar itu dinas kependudukan dan catatan sipil juga menjalin kerjasama dengan pihak lain contohnya adalah provider yang menyediakan pengembangan jaringan untuk pengelolaan SIAK dan organisasi-organisasi pemerintah maupun swasta yang membutuhkan data kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terutama di bidang administrasi kependudukan. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Untuk menjamin akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat di bidangkependudukan, perlu menetapkan kebijakan dan sistem informasi administrasi kependudukan secara nasional.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran penduduk Adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kepedudukan. Penduduk merupakan Adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah di Negara RI dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penduduk yang memiliki KTP adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap  dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah nikah secara sah.

Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga. Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam  keluarga, serta identitas dalam keluarga.

**Kata Kunci : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, SIAK**

**ABSTRACT**

East Kutai Regency is a region with high population and distribution, the government uses a letter of introduction as an invitation or mediator to carry out socialization to the community. And beyond that, the civil service and civil registry also cooperate with other parties, for example, providers who provide network development for the management of SIAK and public and private organizations that require population data.

Information System of Population Administration (SIAK) is a government policy that is set in order to improve the quality of government services, especially in the field of population administration. Population administration information has a strategic value for the administration, development and service to the community, so that the need for the management of population administration information in a coordinated and sustainable manner. To ensure the accountability of services to the public in a single-point reservation, it is necessary to establish policies and information systems for population administration nationally.

Population Administration is a series of activities of structuring and controlling in the issuance of documents and Population Data through Population Registration, Civil Registration, Information Management of Population Administration and utilization of the results for public services and other sectors development.

Population registration Is recording of population biodata, recording of population event report and population data collection Vulnerable population administration and control of population documents in the form of identity card or certificate of residence. Population is Everyone both Indonesian citizens and foreign nationals residing in the territory of the Republic of Indonesia and has complied with the provisions of the applicable Laws and Regulations.

People who have KTP are Indonesian citizens and Foreigners who have Permanent Stay Permit and have been 17 (seventeen) years old or have been married or have been married legally.

The family is a person or group of people who have blood relations and / or other people who live in one house / building and registered in the Family Card. The Family Card is a family identity card containing data on names, family arrangements and relationships, and family identity.

**Keywords: Family Card, Identity Card, SIAK**

**1. PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang semakin pesat mengakibatkan tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat menjadi semakin meningkat, terutama kepada pemerintah. Keluhan masyarakat terhadap kurangnya kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan belum memadainya pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut merupakan tantangan bagi birokrasi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Untuk itu, institusi birokrasi perlu menerapkan strategi peningkatan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang menghendaki kualitas pelayanan.

Terkait dalam usaha peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pemerintah, pemanfaatan informasi merupakan salah satu elemen yang cukup penting. Informasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bisnis dan organisasi, disamping sumber daya alam, modal dan manusia. Selain itu, keterbatasan kapasitas manusia untuk mampu mengolah data dan informasi yang begitu cepat berubah mendorong manusia untuk memanfaatkan secara optimal teknologi dan sistem informasi yang pada zaman ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan kegiatan sehari – hari (Sukirno, 2004).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik ingin meneliti secara langsung, berdasarkan observasi dengan fokus kepada permasalahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kutai Timur, mengingat pentingnya data kependudukan yang akurat dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta banyaknya masalah yang muncul akibat kekurangannya, dan mengangkatnya ke dalam penelitian yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.

* 1. **Rumusan Masalah**

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalam suatu penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka di dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut; Bagaimanakah Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui tentang proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, dan secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian yang dimaksud dalam ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Bermanfaat mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya ilmiah.
2. Bermanfaat menjadi kontribusi yang positif bagi kelanjutan implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di masa-masa yang akan datang.
3. Secara akademis, sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata-1 di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

**2. KERANGKA DASAR TEORI**

**2.1. Landasan Teori dan Konsep**

 2.1.1. Kebijakan Publik

 Kebijakan (policy) diberi arti yang bermacam-macam oleh berbagai pakar. Seperti Friedrick (dalam Winarno, 2002: 16) mendefenisikan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakandan mengatasi masalah dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran ataupun maksud tertentu.

Sedangkan menurut Anderson (dalam Nurcholis, 2007: 263) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Anderson mengklasifikasikan kebijakan (policy) menjadi dua: subtantif dan prosedural. Kebijakan subtantif yaitu apa yang harus dikerjakan, sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

**2.1.4. Sistem Informasi**

2.1.4.1. Sistem

Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi saling tergantung satu sama lain dan terpadu (Kumorotomo, 2004:8). Beberapa pendapat mengatakan hal yang sama bahwa suatu sistem adalah seperangkat bagian yang saling tergantung

* 1. **Definisi Konsepsional**

Menggambarkan adanya hubungan antara konsep yang khusus dengan konsep yang akan diteliti. Konsepsional juga digunakan untuk mendefinisikan pengertian didalam penelitian, agar tidak mengalami pembiasan dalam pengumpulan data hingga pada tahap analisis penelitian.

Adapun defenisi konsepsional dalam penelitian ini, adalah :

1. Sistem Informasi

Merupakan software data dari Pemerintah yang baku dan tersistematis dan fokus pada penggunaan sistem tersebut yang berguna untuk menunjang kinerja Pemerintahan dalam mengolah data-data kependudukan pada setiap tingkatan wilayah pemerintahan disetiap provinsi hingga kecamatan.

1. Administrasi Kependudukan

Tindakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan dalam menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mencakup fokus pengelolaan ada yang berhubungan dengan data yang terhimpun melalui masyarakat, yaitu :

1. Administrasi kependudukan yang dipahami dan dimengerti masyarakat.
2. Penduduk wajib memiliki e-KTP
3. Mengerti NIK
4. Wajib memiliki kartu keluarga

**2.3. Kerangka Pemikiran**

Konsep adalah suatu hasil pemaknaan dalam intelektual manusia yang memang merujuk ke gejala nyata kedalam empirik. Konsep adalah sarana merujukkedua empiris, dan bukan merupakan refleksi sempurna (mutlak) dunia empiris bahkan konsep bukanlah dunia empiris itu sendiri.

**Sistem Informasi Administrasi Kependudukan :**

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
2. Penyediaan Data
3. Penyelenggaraan Pertukaraan Data

**Dinas Kependudukan dan**

**Catatan Sipil :**

1. Administrasi Kependudukan
2. Wajib memiliki e-KTP
3. Mengerti NIK
4. Kepemilikan Kartu Keluarga

**Sistem Informasi Administrasi Kependudukan :**

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
2. Penyediaan Data
3. Penyelenggaraan Pertukaraan Data

Implementasi kebijakan

Penataan administrasi kependudukan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

pelayanan administrasi merupakan penerapan dari keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya dengan masyarakat sebagai objeknya. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah kebijakan baru pemerintah dalam bidang kependudukan dan ditujukan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) merupakan tindakan yang diambil pemerintah yang berada di daerah pada tingkat kabupaten untuk mencapai tujuan dalam menata sistem administrasi kependudukan yang searah dengan tujuan pemerintah sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk pembangunan.

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1. Jenis Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana implementasi kebijakan Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat.

Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas.

**3.2. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di Kabupaten Kutai Timur, meliputi :

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas penduduk dan pencatatan sipil.
3. Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan
4. Penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi
5. data individu dalam pelayanan publik
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Administrasi kependudukan
8. Penduduk wajib memiliki e-KTP
9. Mengerti NIK
10. Wajib memiliki kartu keluarga
11. Yang menjadi sumber informasi dalam wawancara adalah sebagai berikut :
12. Key Informan (Informan Kunci) : Kepala Disdukcapil Kutim Januar Harlian Putera Lembang Alam
13. Informan : Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur maka ditentukan 14 informan dengan rincian 10 pertanyaan ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan 4 orang kepada masyarakat.

**3.3. Sumber Data**

Sumber data diperoleh melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.

**3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi jenis dan sumbernya yaitu:

1. Teknik pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara, yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Selain itu, pengumpulan data primer dilakukan melalui metode observasi, yaitu dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

1. Teknik pengumpulan data sekunder:
2. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti serta analisis peraturan daerah.
	1. **Teknik Analisa Data**

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

1. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari infomasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

1. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)

Data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif, yakni dengan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan dari para informan lalu dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dengan metode analisa deskriptif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan kemampuan daya nalar peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta, data dan informasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti, serta jawaban atas pertanyaan penelitian atau perumusan masalah kemudian diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

* 1. **Wilayah Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang beralamat di Jl. AW. Syahrani, Tlk. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

* 1. **Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bulan November 2017 sampai Januari 2018

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** | **Bulan** |
| **Nopember****2017** | **Desember 2017** | **Januari 2018** |
| Rencana Judul Skripsi  | ■ |  |  |
| Pengajuan Jadwal Skripsi | ■ |  |  |
| Pembuatan Proposal | ■ |  |  |
| Konsultasi Bab I |  | ■ |  |
| Konsultasi Bab II |  | ■ |  |
| Konsultasi Bab III |  |  | ■ |
| Seminar Proposal Skripsi |  |  | ■ |

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Lokasi Penelitian**

**4.1.1. Sejarah Kabupaten Kutai Timur**

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu  wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang di bentuk berdasarkan UU. 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Propinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999.

Secara administrasi memiliki luas 3.574.745 Km2 (17%) dari wilayah Kalimantan Timur. Luas daratan Kabupaten Kutai Timur = 3.377.164,65 Ha (perhitungan luas paduserasi, Citra Landsat TM-7 2002/2003,   1 : 250.000 & Peta RTRWP 1999 Prov Kaltim)

Perhitungan akhir sampai Desember 2005, luas daratan Kabupaten Kutai Timur = 3.188.462 Ha (penyusunan RTRW Kabupaten Kutai Timur 2005). Melihat perhitungan diatas luas daratan Kabupaten Kutai Timur telah berkurang sebanyak 188.702,65 Ha dikarenakan pergeseran Tata Batas Kabupaten Kutai Timur yang masuk menjadi wilayah Kabupaten Berau (Kec. Kongbeng, Sangkulirang, dan Sandaran) Topografi wilayah antara 2 m – 1.606 m dari permukaan laut. Terdiri dari 18 Kecamatan dengan 135 desa.

**4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.2.1. Tertib Administrasi Kabupaten Kutai Timur**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, serta dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan berpijak pada kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan, telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tahun anggaran 2015.

Kebijakan Pemerintah untuk membangun dan mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan dan menciptakan sistem pengenal tunggal (nomor induk kependudukan) bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia. Kebijakan Pemerintah tersebut sebagai refleksi atas Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaan, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarsi kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk kependudukan Secara Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional.

**4.2.2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur**

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perumusan perencanaan kebijakan teknisoperasional program pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan dalam upaya pemberian pelayanan umum dan teknis pelaksanaan kesekratariatan, penetapan kebijakan, sosialisai,bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan, koordinasi pelayanan,pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan dan pengembangan SDM pengelolaan dan pengawasan pelayanan kependudukan dalam sistem informasi penduduk, pencatatan sipil,informasi layanan informasi administrasi dan sistem informasi kependudukan sesuai norma danstandar, prosedur dan kreteria perencanaan , pengendalian dan pengembangan kualitas,pengarahan mobilitas dan persebaran serta perlindungan penduduk yang searah dengan kebijakan umum daerah.

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsure staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan teknis kesekretariatan dan pengkoordinasian bidang–bidang lingkup Dinas dengan menyelenggarakan pelayanan umum administratif kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretariat sebagai mana diatas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretariat membawahi:

3. Bidang Pelayanan Kependudukan

Bidang Pelayanan Kependudukan merupakan unsur pelaksanaan teknis manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas–tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan kependudukan serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku dan membawahi :

5. Seksi Pelayanan Penduduk dan Indentitas Penduduk

Merupakan unsur pelaksana pelayanan teknis operasional Bidang Pelayanan Kependudukan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan kegiatan operasional program penyiapan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi, penyelengaraan pemantauan dan evaluasi, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, pengawasan serta menyelengarakan pemberian identitas penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pelaksanaan tugas–tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang yang searah kebijakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Seksi Pindah dan Datang Penduduk

Merupakan unsur pelaksana pelayanan teknis operasional Bidang Pelayanan Kependudukan mempunyai tugas pokok memimpin, membina danmengkoordinasikan kegiatan operasional program penyiapan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pelaksanaan tugas–tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang yang searah Kebijakan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Seksi Penyerasian, Kebijakan & Perencanaan Kependudukan

Merupakan unsur pelaksana pelayanan teknis operasional Bidang Pelayanan Kependudukan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan kegiatan operasional program penyiapan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, pengawasan serta menyelenggarakan pengolahan dan menyajikan dan mendokumentasikan data penduduk serta pelaksanaan tugas–tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang yang searah kebijakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Bidang Pengelolaan, Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan.

Unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen kependudukan dan pencatatan sipil dengan menyelenggarakan kegiatan perumusasn kebijakan, sosialisasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan Pengolahan, Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai kebijakan umum daerah. Bidang tersebut membawahi:

8. Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan unsur pelaksanaan teknis manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Kependudukan ddan Pencatatan Sipildalam merumuskan penyusunan kebijakan, yaitu:

9. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi

Merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen kependudukan dan pencatatan sipil dengan menyelenggarakan kegiatan perumusan kegiatan kebijakan, sosialisasi, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan fasilitas pendayagunaan data adminsitrasi kependudukan yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai kebijakan umum daerah.

**4.2.3. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat**

Adapun hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan bidang terkait, bertujuan untuk memperoleh data yang akurat. Peneliti melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut.

Peneliti melakukan wawancara yang berkaitan dengan pelayanan khususnya pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yang berada pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil maupun kepada masyarakat.

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam hal pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)? (Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bapak Januar Harlian Putera Lembang Alam)
2. Bagaimana landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Informasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Kutai Timur?
3. Menurut pendapat bapak, Apa saja kendala dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan KTP dan KK kepada masyarakat?
4. Bagiamana cara melaksanakan pekerjaan sehingga tetap terjaga kondusif dalam ruang pekerjaan dalam bidang pelayanan KK dan KTP?
5. Apakah ada kendala antara atasan dengan bawahan ketika terjadi permasalahan dalam Pelayanan KK dan KTP?
6. Menurut bapak, bagaimana bentuk komunikasi jika pelayanan KK dan KTP memgalami kendala?
7. Bagaimana koordinasi pegawai dalam ruangan sehingga mudah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat?
8. Bagaimana bentuk komunikasi yang dibangun sehingga tercapai kesesuaian kerja yang maksimal dalam memberikan pelayanan?
9. Menurut pendapat bapak, SIAK sebagai suatu program untuk meningkatkan kualitas data kependudukan memerlukan partisipasi masyarakat?
10. Bagaimana bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program SIAK di Kabupaten Kutai Timur yang sudah berjalan selama ini?

Adapun Pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat yaitu:

Pertanyaan : “Bagaimana pendapat bapak mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam hal pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?

Jawab: *“Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan untuk mengatasi semua masalah-masalah dibidang kependudukan, hingga terciptalah suatu suasana tertib administrasi. SIAK ini sendiri diharapkan dapat membantu untuk mengadakan pemetaan kependudukan yang rapi, sehingga juga nantinya dapat membantu jajaran pemerintah didalam pekerjaan lainnya. Mengenai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelayanan dilakukan semaksimal dan seefektif mungkin sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama selesainya proses urusan masyarakat yang berlangsung, dan pelayanan dilakukan dengan menjunjung tinggi bahwa sudah saatnya pelayanan memberikan bukti pelayanan yang baik sehingga masyarakat dapat merasakan serta memberikan respon yang positif juga.”* (Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur)

Pertanyaan : “Menurut bapak, bagaimana bentuk komunikasi jika pelayanan KK dan KTP memgalami kendala?’’

Jawab : *“Baik, tapi ya segan-segan juga dengan atasan kita, ruang dan kesempatan untuk bisa berkomunikasi juga tidak banyak, sehingga komunikasi dari bawah ke atas ya saat-saat diperlukan saja. Saya tetap berkomunikasi dengan atasan dalam bentuk yang formal seperti dalam memberi laporan kerja dan menanyakan hal-hal yang kurang jelas dari pekerjaan.”* (Wawancara dengan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Penduduk).

Pertanyaan : “Menurut bapak, bagaimana pelayanan kualitas pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkaitan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?

Jawab: *“Pelayanan yang kami rasakan masih tergolong baik karena pegawai ramah dan mau menyapa masyarakat. Adanya respon dialog yang baik antara pegawai dengan masyarakat, dialog itu menjadikan suasana menjadi tidak kaku, bertanya dahulu apa keperluan masyarakat sehingga datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Juga, Adanya ruang tunggu yang disediakan dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hanya terkadang antrian yang panjang mengakibatkan kebosanan.* (Wawancara dengan Bapak Agung, salah satu masyarakat yang berurusan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

Adapun realiasi pencapaian kinerja dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Pencapaian Kinerja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kerja** | **Satuan** | **Kinerja** | **RPJMD 2016** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Target** | **Real****isasi** |
| 1 | Rasio Penduduk Ber-KTP Elektronik Per-Satuan Penduduk | orang | 37.88 | 71.90 | 37.11 | 60.23 | 90 | 90% |
| 2 | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Orang | 93.00 | 61.00 | 40.00 | 62.00 | 90 | 90% |
| 3 | Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| ***Sumber*** *: Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur 2017* |

**Tabel 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kerja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi Anggaran & Kinerja 2015** | **Realisasi Anggaran & Kinerja 2016** |
| 1 | Rasio Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk | Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | 60.23% | 66% |
| 2 | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Jumlah KTP yang Diterbitkan  | 62% | 66% |
| 3 | Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) | Jumlah Kartu Keluarga (KK) yang Diterbitkan | 100% | 100% |
| ***Sumber*** *: Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur 2017* |

Di samping standar pelaksanaan dan sasaran implementasi SIAK, yang perlu mendapat perhatian dalam proses implementasi adalah masalah sumber daya. Sumber daya merupakan faktor utama dalam melaksanakan dan merealisasikan jalannya suatu program, tidak terkecuali dengan dana yang dibutuhkan, peralatan yang akan digunakan selama proses implementasi hingga sumber daya manusia yang tergolong mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya tahapan pelaksanaan, manfaat apa yang diterima oleh masyarakat serta apa yang menjadi hambatan pelaksanaan implementasi ini.

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk melihat kondisi sumber daya organisasi, yakni staf (street level bureacrat), dana, dan fasilitas. Staf dapat dilihat dari jumlah dan kualitas kompetensi pegawai operasional yang dimiliki organisasi, dana dari keuangan organisasi, serta fasilitas dari ketersediaan sarana dan prasaran yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki staf dalam jumlah yang terbatas. Untuk mengatasi hal itu, pihak dinas menerima pegawai honorer yang mampu mendukung kegiatan operasional bersama-sama dengan staf di bawah arahan masing-masing kepala seksi. Staf di masing-masing bidang dalam dinas memiliki kompetensi yang cukup baik. Mereka menguasai bidang pekerjaan mereka, dan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Pihak dinas juga mengadakan pelatihan untuk staf dalam bidang-bidang tertentu, supaya pelaksanaan program SIAK yang berbasis teknologi informasi dapat berjalan dengan baik.

Selain staf, dana juga merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan sebagai sumber daya organisasi. Dana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan data yang telah dikumpulkan, sejalan dengan anggaran yang sebelumnya telah direncanakan. Ketersediaan dana seperti ini tentu saja sangat mendukung keberlangsungan program SIAK di Kabupaten Kutai Timur.

Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cukup memadai. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program SIAK khususnya dapat ditemukan di ruangan dan di lingkungan dinas. Komputer sebagai alat paling mendasar tersedia dalam jumlah yang cukup dan siap digunakan beserta mesin printer dan server data yang bisa menampung seluruh database kependudukan Kabupaten Kutai Timur. Ada pula fasilitas WiFi yang berfungsi sebagai sarana komunikasi data (online communication), yang merupakan sarana kunci dari pelaksanaan SIAK.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kondisi sumber daya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sudah cukup baik. Kekurangannya, staf dengan kompetensi khusus berjumlah terbatas, dan hal ini bisa menjadi masalah organisasi bila staf yang dimaksud mengalami masalah secara pribadi. Selain itu, semua aspek dikondisikan dengan baik dan sangat mendukung pencapaian terlaksananya program SIAK.

**5. PENUTUP**

* 1. **KESMIPULAN**

Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah yang memiliki penduduk dengan jumlah dan persebaran yang tinggi, maka pemerintah menggunakan surat pengantar sebagai undangan atau mediator untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Dan diluar itu dinas kependudukan dan catatan sipil juga menjalin kerjasama dengan pihak lain contohnya adalah provider yang menyediakan pengembangan jaringan untuk pengelolaan SIAK dan organisasi-organisasi pemerintah maupun swasta yang membutuhkan data kependudukan.

Sosialisasi dengan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang berupa sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Dimana petugas dari dinas kependudukan dan catatan sipil langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang apa itu SIAK, bagaimana pelaksanaannya dan apa yang menjadi fungsinya. Adapula sosialisasi yang dilakukan melalui mediator seperti penggunaan papan spanduk. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan untuk mengatasi semua masalah-masalah dibidang kependudukan, hingga terciptalah suatu suasana tertib administrasi. SIAK ini sendiri diharapkan dapat membantu untuk mengadakan pemetaan kependudukan yang rapi, sehingga juga nantinya dapat membantu jajaran pemerintah didalam pekerjaan lainnya. Mengenai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelayanan dilakukan semaksimal dan seefektif mungkin sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama selesainya proses urusan masyarakat yang berlangsung, dan pelayanan dilakukan dengan menjunjung tinggi bahwa sudah saatnya pelayanan memberikan bukti pelayanan yang baik sehingga masyarakat dapat merasakan serta memberikan respon yang positif juga.

Pada dasarnya SIAK ini sendiri diadakan karena adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang mengatur tentang administrasi kendudukan. Kemudian pelaksanaan SIAK dipertegas lewat Undang-Undang No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan administrasi kependudukan. Dan untuk kabupaten Kabupaten Kutai Timur sendiri SIAK di laksanakan dengan menggunakan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 5 tahun 2006, yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kutai Timur.

Semua aktifitas pelayanan terlaksana dengan baik, hanya saja tidak semua pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelayanan yang ada. Ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan, yang tidak hanya berasal dari dinas tapi juga berasal dari masyarakat sendiri. Sebagai contoh, masyarakat yang ingin mengurus pembuatan Kartu Keluarga, akan tetapi data atau berkas yang diperlukan tidak dapat dilengkapi oleh masyarakat tersebut. Ini semua membuat prosedur pelayanan tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik.

* 1. **SARAN**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pelayanan harus diletakkan sebagai tindakan terdepan karena pelayanan adalah hal yang utama dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan dalam Sistem Administrasi Informasi Kependudukan. Pelayanan dilakukan dengan menjunjung tinggi bahwa sudah saatnya pelayanan memberikan bukti pelayanan yang baik sehingga masyarakat dapat merasakan serta memberikan respon yang positif juga
2. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan kritik yang membangun agar tercapai kesinergisan antara pemerintah dalam hal ini SIAK dengan masyarakat.
3. Salah satu hal yang terpenting dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pelayanan utama. Pelayanan dilakukan semaksimal dan seefektif mungkin sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama selesainya proses urusan masyarakat yang berlangsung
4. Adanya peran aktif dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat memberikan respon positif kepada pemerintah. Sosialisasi dengan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang berupa sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Dimana petugas dari dinas kependudukan dan catatan sipil langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang apa itu SIAK, bagaimana pelaksanaannya dan apa yang menjadi fungsinya. Adapula sosialisasi yang dilakukan melalui mediator seperti penggunaan papan spanduk.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpikiran maju dan menjunjung tinggi pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin tanpa adanya kesan tidak baik dari masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, Khoirul. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah. Malang: Pustaka Pelajar, 2004

Basrowi – Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, perspektif mikro. Surabaya : Insane Cendikia.

Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo, 2007

Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media

Soenarko SD, H. Public Policy, 2003, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Menganalisa Kebijakan Publik. Surabaya: Airlangga University Press.

Syaukani, Gaffar dan Rasyid, M. Ryaas. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Tangkilisan, Hesel Nogi S. A. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset, 2003

Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: YPAPI, 2003

Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo,2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan